

**DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(R K P D)
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)
TAHUN ANGGARAN 2022**



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi





RKPD Kabupaten Balangan
Tahun 2023

No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Nilai Predikat Indeks Inovasi Daerah		55 Penelitian	1.123.759.550	APBD
		Persentase penelitian dan pengembangan daerah yg dimanfaatkan		100 %		
20	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah				16.938.831.819	APBD
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				16.938.831.819	APBD
	Keuangan				16.938.831.819	APBD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Akip Badan Keuangan Daerah		BB	12.276.589.413	APBD
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)		WTP	1.339.720.650	APBD
	Program Penataan Dan Pengelolaan Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah		40	1.083.222.400	APBD
	Program Peningkatan Dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	% Penerimaan Pbb p-2 Dan Bphtb, % Penerimaan Pad Selain Pbb -p2 Dan Bphtb, Dan Persentase Pendapatan Non Pad		1	765.944.356	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Daerah			1.473.355.000	
21	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				12.256.146.382	APBD
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				10.665.919.382	APBD
	Kepegawaian				10.665.919.382	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan/ketersediaan penunjang pelaksanaan fungsi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan		100 %	5.958.287.820	APBD

5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					18 Laporan	134.900,900	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pengelola Keuangan SKPD, Sub Unit SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan	18 Laporan	116,916,54	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi					608 Laporan	105.033,100	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pengelola Keuangan SKPD, Sub Unit SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan	608 Laporan	101,178,630	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					1 Dokumen	237,353,700	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pengelola Keuangan SKPD, Sub Unit SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan	1 Dokumen	126,314,600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.03	8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					1 Dokumen	271,049,400	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pengelola Keuangan SKPD, Sub Unit SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan	1 Dokumen	364,899,200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					100 Orang	927,164,300	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Poltuhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	Pengelola Keuangan SKPD, Sub Unit SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan	100 Orang	394,526,550	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%		100 %	219.288.986.734						100 %	93.887,428,140	
5	2	2	2.04	8	Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisa Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					6 Laporan	203.429.441.840	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	6 Laporan	90.909.309,370	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					6 Laporan	14.500.000,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	6 Laporan	1,485,000,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota					6 Laporan	1,359,544,894	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil		Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	6 Laporan	1,493,116,770	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	%		%		42	2.243.230.400						45	2,196,885,100	

5	2	3	2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	2,243,230,400						100 %	2,198,885,100	
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun			2 Dokumen	238,774,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Wilayah	SKPD	2 Dokumen	238,774,800	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			60 Dokumen	102,931,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	60 Dokumen	119,507,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			0 Dokumen	139,136,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	0 Dokumen	210,845,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah			0 Laporan	108,460,100		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	0 Laporan	95,834,600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			0 Laporan	366,150,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	0 Laporan	598,769,850	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			0 Laporan	49,641,500		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	0 Laporan	49,187,450	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			0 Dokumen	265,358,200		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	0 Dokumen	429,426,650	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			0 Laporan	856,966,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	0 Laporan	343,132,750	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0 Orang	95,811,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	0 Orang	113,406,500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB, % Penerimaan PAD selain PBB P-2 dan BPHTB, dan Persentase Pendapatan Non PAD	%		%	100 %	2,311,126,600						100 %	2,034,083,570	
5	2	4	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tenelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	%		%	100 %	2,311,126,600						100 %	2,034,083,570	
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	288,761,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	2 Dokumen	254,879,900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				3 Laporan	225,381,800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	3 Laporan	218,823,000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	265,280,500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	1 Laporan	286,708,180	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Diseuaikan NJOP nya				42000 Obyek Pajak	214,859,900	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	42000 Obyek Pajak	366,508,010	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3500 Layanan	402,976,400	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	3500 Layanan	283,448,550	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	91,327,000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan	SKPD	12 Dokumen	100,522,730	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH